

ABSTRAK

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberi akses kepada masyarakat guna mengawasi penyelenggaraan negara. Tertutupnya akses atas informasi publik acap kali membuat objek informasi tersebut menjadi sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, khususnya informasi publik yang dikecualikan, serta korelasi antara peranan Komisi Informasi dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih banyak ditemukan kasus sengketa informasi publik, terutama terkait informasi yang dikecualikan, dalam hal ini dasar pertimbangan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan masih belum cukup jelas. Selain itu, hal tersebut juga menandakan bahwa sosialisasi terhadap Badan Publik dan masyarakat perihal keterbukaan informasi belum efektif. Diperlukan peningkatan peran Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten dalam mengawal keterbukaan informasi, memperjelas pedoman dalam melakukan uji konsekuensi, serta meningkatkan sosialisasi terkait kepada Badan Publik dan masyarakat.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Informasi yang dikecualikan, sengketa informasi.

ABSTRACT

Information disclosure in the administration of the state can improve the quality of public services, as well as provide access to the public to oversee the administration of the state. The closed access to public information often makes the object of that information become an information dispute. This study aims to determine the role of the Information Commission in resolving public information disputes, specially exempted public information, as well as the correlation between the role of the Information Commission and fulfilling the public's right to public information. The research method used is empirical juridical with qualitative specifications.

The results of the study indicate that public information disclosure has not been fully implemented properly. There are still many cases of disputes over public information, especially related to excluded information, in this case, the basis for consideration of the consequence test on excluded information is still not clear enough. In addition, this also indicates that socialization to public agencies and the public regarding information disclosure has not been effective. It is necessary to increase the role of the Provincial/Regency Information Commission in overseeing the disclosure of information, clarifying guidelines for conducting consequence tests, and increasing related socialization to Public Agencies and the public.

Keywords: Disclosure of Information, Excluded Information, Information Dispute.